

Mewaspadaai Ancaman Terhadap Disintegrasi Bangsa

Harry Budiman

PENDAHULUAN.

Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak menciptakan suatu perdamaian dunia sebagaimana diharapkan oleh sebagian masyarakat dunia. Ketiadaan balance of power di antara negara-negara besar justru menimbulkan suasana tidak menentu sebagai akibat dominasi satu-satunya negara adidaya yang dapat berbuat sekehendak hatinya.

Perubahan global yang ditandai oleh semakin maraknya proses globalisasi dalam bidang politik (demokratisasi dan HAM), ekonomi (liberalisasi perdagangan), teknologi komunikasi dan transportasi, serta sosial-budaya (pemberdayaan *civil society* dan penetrasi budaya asing) telah meningkatkan terjadinya perubahan masyarakat secara sangat cepat, sehingga seringkali terjadi benturan di masyarakat.

Fenomena politik global pasca Perang Dingin diwarnai oleh ledakan konflik di dunia. Konflik antar bangsa karena alasan-alasan ideologi, politik, dan ekonomi kini telah tergiring arus globalisasi menjadi konflik antar kepentingan yang lebih luas, lebih cepat, lebih rumit, dan lebih berbahaya. Dalam globalisasi terjadi perluasan (*extensivity*) kegiatan sosial, ekonomi, dan politik

yang melampaui batas negara sedemikian, sehingga peristiwa, keputusan, dan kegiatan di suatu bagian dunia dapat mempunyai dampak terhadap masyarakat dan individu di bagian dunia lainnya yang jauh. Begitu pula sebaliknya, keterkaitan interaksi global menyebabkan terlebarnya dimensi lokal, sehingga dampak dari kejadian yang sangat lokal sekali pun dapat menimbulkan konsekuensi global yang besar. Akibatnya, hampir semua negara di dunia telah terlebur ke dalam dan secara fungsional menjadi bagian dari aliran global yang lebih besar yang terus tergiring ke arah satu poros.

Dunia akan terpola pada semata-mata sistem demokrasi liberal, dengan Amerika Serikat (AS) sebagai porosnya. Meskipun bergerak dalam satu poros, bukan berarti konflik dalam dunia global berakhir. Justru terjadi pergeseran konflik yang bukan lagi konflik ideologi, politik, dan ekonomi, tetapi konflik besar peradaban. Isu antar peradaban akan menggantikan isu-isu antar negara dan justru merupakan *point* paling peting dalam agenda internasional.

Konflik yang terjadi semakin menunjukkan masih akan terjadi kekerasan, teror, dan invasi akibat krisis peradaban, suatu keadaan di mana masing-masing

peradaban saling mencurigai terkait adanya animo untuk menguasai dan mendikte. Sementara itu penolakan keras terhadap animo untuk menguasai dan mendikte suatu peradaban tertentu dapat memicu perlawanan total, di antaranya bisa berbentuk aksi terorisme.

Terorisme merupakan fenomena global yang bisa saja merebak ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Untuk itu dalam waktu ke depan, terorisme merupakan ancaman yang paling menonjol di samping gerakan separatisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang masih akan terus bergulir perlu diwaspadai potensi kerawanan dan eksekusinya yang bisa saja memicu konflik sosial dan mengarah pada disintegrasi bangsa.

Perkembangan lingkungan strategis merupakan kecenderungan yang cukup menonjol yang senantiasa akan mempengaruhi perkembangan, sikap maupun kebijakan Pemerintah RI, baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis ini akan

terasa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Globalisasi selain membawa aspek-aspek positif, juga yang harus diwaspadai adalah dampaknya yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla (SBY-MYK) sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung secara demokratis belum menjadi jaminan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bisa berjalan tanpa guncangan yang berarti. Dalam perjalanannya, Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin SBY-MYK tidak luput dari permasalahan yang harus dihadapi, meskipun sejauh ini belum sampai pada tingkat yang sangat kritis yang dapat membahayakan eksistensinya. Dalam kurun waktu satu tahun ke depan, permasalahan tersebut masih akan mewarnai perjalanan pemerintahan, terutama berkaitan dengan kondisi subyektif di dalam negeri di samping pengaruh lingkungan strategis yang tidak lagi bisa dinafikan sebagai konsekuensi dalam era globalisasi.

LINGKUNGAN STRATEGIS.

Perkembangan internasional.

Secara umum, perkembangan internasional masih akan didominasi oleh hegemoni Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya negara adidaya. Keunggulan AS sebagai kekuatan dunia didukung oleh adanya penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer maupun dukungan politik dalam negeri akan tetap dipertahankan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena itu, AS tetap menaruh perhatian dan peran yang sangat signifikan pada isu keamanan kawasan dan global. Sejak tragedi yang menimpa *World Trade Center* (WTC) 11 September 2001, tanpa mengurangi perhatiannya terhadap potensi gangguan keamanan tradisional, kebijakan keamanan global AS dalam beberapa tahun belakangan ini dan ke depan lebih terfokus kepada masalah gangguan keamanan yang bersumber dari ancaman terorisme. Sejak itu, kampanye melawan terorisme terus dilancarkan ke berbagai kawasan dunia. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya sebagai negara adidaya, AS terus berupaya memerangi terorisme dan tidak segan-segan memberikan bantuan finansial, teknik maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara lain. Memasuki periode kedua kepemimpinan George W Bush,

kebijakan keamanan global AS tidak mengalami perubahan, bahkan untuk mensukseskan kampanye perang melawan terorisme dikemas lebih *elegant* yakni perang melawan pemerintahan tirani dan pemusnahan senjata massal. Dengan kebijakan barunya tersebut, memungkinkan bagi AS untuk menyerang negara tertentu yang dianggapnya sebagai basis terorisme atau *state sponsor terrorism* yang membahayakan keselamatan dan keamanan AS. Afghanistan dan Irak merupakan dua negara korban kebijakan *pre-emptive strike* AS, dan sasaran berikutnya adalah Iran.

Sementara itu, perang global melawan terorisme masih akan difokuskan pada upaya memberantas jaringan Al Qaeda yang mulai menyebar ke kawasan Eropa dan Amerika Latin. Kasus peledakan bom di London, Inggris pada Juli 2005 dan tertangkapnya beberapa anggota Al Qaeda di Argentina, semakin menguatkan indikasi perluasan jaringan terorisme internasional Al Qaeda ke kawasan Eropa dan Amerika Latin. Kawasan Afrika juga akan menjadi *hot spot* isu terorisme di mana Al Qaeda melihatnya sebagai *safe-haven* baru setelah basis-basisnya di Afghanistan dan Irak digempur AS. Demi kelangsungan organisasi, Al Qaeda mengubah strateginya dari organisasi yang

terstruktur menjadi organisasi yang lentur (*loose organization*). Struktur organisasi Al Qaeda yang bersifat *loose organization* menjadikannya mudah untuk berkembang di sejumlah negara dalam bentuk sel-sel yang sangat terkompartementasi. Dalam perkembangannya, karena pergerakan jaringan Al Qaeda semakin terbatas, jaringan ini akan bermetamorfosis dalam bentuk kelompok-kelompok radikal Islam dengan nama yang berbeda, namun tetap menjaga semangat radikalisme. Kelompok-kelompok ini akan menampakkan diri sebagai kelompok yang legal dan terkesan tidak memiliki hubungan dengan jaringan teroris. Fenomena metamorfosis jaringan teroris menjadi organisasi massa keagamaan akan menjadi trend gerakan terorisme ke depan. Selain itu, spirit perjuangan Al Qaeda telah mengilhami generasi muda Islam di beberapa negara. Tertangkapnya anggota jaringan Al Qaeda yang terlibat dalam peledakan bom London menunjukkan bahwa semangat terorisme telah melanda kalangan generasi muda Islam radikal yang terpelajar.

Sedang untuk kawasan Asia Tenggara, isu terorisme masih akan terfokus pada upaya menghancurkan kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Peledakan bom Bali II

pada 1 Oktober 2005 membuktikan bahwa jaringan Ji masih membahayakan keamanan negara. Perkembangan penanganan kasus bom Bali II ini masih akan mewarnai hubungan antar negara di tingkat regional ASEAN dan Australia.

Kampanye global melawan terorisme masih akan difokuskan pada kelompok-kelompok teroris dan radikal Islam. Hubungan antar negara pun lebih banyak berkuat pada masalah bagaimana memerangi terorisme dan radikalisme. Konflik Israel – Palestina, keberpihakan AS pada Israel, pendudukan AS di Irak dan Afghanistan, tekanan AS pada Iran dan Syria, misalnya, merupakan beberapa faktor yang memicu timbulnya perlawanan kelompok-kelompok radikal Islam yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk serangan terorisme.

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi perkembangan terorisme internasional adalah masalah Irak. Masalah Irak masih akan menjadi fokus perhatian masyarakat internasional, karena keberadaan AS di Irak telah semakin meningkatkan semangat anti-AS di kalangan dunia Islam, sehingga dapat melahirkan kelompok-kelompok teroris baru. Kelompok-kelompok ini bersinergi

dengan kelompok perlawanan Irak, melakukan serangan terhadap kepentingan AS dan sekutunya di dalam maupun di luar Irak. Ancaman serangan teroris pun bermunculan terhadap negara-negara yang mengirimkan pasukannya ke Irak. Dalam hal ini posisi AS sangat dilematis. Di satu sisi AS ingin menarik pasukannya setelah pemerintahan baru Irak terbentuk karena telah menyerap banyak dana, namun di sisi lain, AS tidak dapat meninggalkan Irak karena situasi negara tersebut belum sepenuhnya aman dan masih rawan akan timbulnya konflik antar kelompok besar, seperti Sunni, Syiah, dan Kurdistan yang mengancam keutuhan Irak. AS akan kehilangan muka di dunia internasional jika meninggalkan Irak dalam perpecahan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat ke depan AS diperkirakan masih akan terus berkuat dengan masalah Irak.

Selain masalah terorisme, kebijakan AS juga masih akan didasarkan pada dalih demokratisasi dan penegakan HAM. Namun, selama kepemimpinan Presiden AS George W. Bush, isu HAM dan demokratisasi terpinggirkan oleh isu terorisme. Terciptanya hubungan “baik” antara AS dengan negara lain sangat tergantung pada besarnya kepentingan AS dalam memerangi terorisme di sua-

tu negara, terlepas apakah negara tersebut demokratis dan menjunjung tinggi HAM atau tidak. Pola hubungan AS-Pakistan menggambarkan fenomena hubungan tersebut. Namun demikian, AS juga mengaitkan isu perang global melawan terorisme dengan upaya untuk menerapkan demokrasi dan menegakkan HAM di negara-negara yang dikategorikan *failed-state*.

Kepentingan nasional AS yang senantiasa mewarnai kebijakan luar negerinya adalah minyak. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat internasional akan minyak membuat harga minyak dunia melambung hingga US\$ 70./barrel. Harga minyak dunia yang semakin melambung ini dipengaruhi oleh hancurnya beberapa kilang minyak di AS akibat serangan angin topan, dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara berkembang, seperti RRC dan India. Kesemuanya telah mempengaruhi tingginya kebutuhan akan minyak bumi. Harga minyak dunia pun akan semakin tinggi jika terjadi konflik antara AS dengan Iran. Atau sebaliknya, tingginya harga minyak justru akan semakin menggiring pada terciptanya konflik antar kedua negara tersebut, mengingat Iran merupakan negara penghasil minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi.

Isu lain yang akan mewarnai politik dan keamanan internasional adalah perkembangan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah merupakan *hot spot* dalam keamanan internasional. Berbagai konflik terjadi, baik antar negara maupun di dalam negeri suatu negara. Belum lagi dengan tingginya intensitas aksi terorisme. Kawasan ini masih akan diwarnai dengan fluktuasi hubungan Israel-Palestina. Kendati Israel telah menarik diri dari Gaza, namun bukan berarti konflik kedua negara tersebut berakhir. Masih ada hal-hal yang mengganjal hubungan kedua negara tersebut. Selain itu, keberadaan kelompok ekstrim Yahudi dan Islam di wilayahnya masing-masing menjadi salah satu faktor pengganggu bagi terselesaikannya konflik Israel-Palestina.

Isu lain yang juga mengemuka dan perlu mendapatkan perhatian adalah masalah Timor-Timur. Pada dasarnya masalah Timor-Timur sudah tidak lagi menjadi pusat perhatian internasional. Namun demikian, ada beberapa isu yang berpotensi menguat dan menjadi perhatian masyarakat internasional, dan dapat mengganggu kelangsungan hubungan RI-Timor Leste. Salah satunya adalah keputusan Sekjen PBB untuk mengirimkan *Commission of Expert* PBB guna menyelidiki kasus pelanggaran

HAM Timor-Timur pasca jajak pendapat 1999. Kendati pemerintah RI-Timor Leste telah sepakat untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, namun masih ada pihak-pihak di Timor Leste, Indonesia, maupun di dunia internasional yang mencoba untuk terus menggoalkan upaya Sekjen PBB tersebut. Selain masalah *Commission of Expert*, masalah yang cukup mengganggu adalah masalah perbatasan RI-Timor Leste, yang rawan akan penyelundupan barang dan pelintas batas. Tingkat perekonomian yang rendah dan mahalnya barang kebutuhan pokok di Timor Leste membuat arus penyelundupan barang dari Indonesia ke Timor Leste marak.

Isu lingkungan hidup juga akan mewarnai perkembangan hubungan internasional dalam beberapa tahun ke depan. Tingginya intensitas bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim global akan menggiring negara-negara di dunia untuk lebih serius lagi mengkampanyekan *Kyoto Protocol*, khususnya dalam mengurangi penggunaan unsur-unsur yang merusak lapisan ozon dan mempengaruhi pemanasan global. Hubungan internasional juga akan diwarnai dengan isu pemberantasan kemiskinan global melalui program MDGs. Tuntutan pelaksanaan program MDGs banyak diserukan oleh negara-

negara berkembang guna mengurangi kesenjangan antara negara maju dengan berkembang dan terbelakang, sekaligus mengurangi ekse negatif kesenjangan ekonomi tersebut yang dapat memunculkan bibit-bibit radikalisme dan terorisme.

Perkembangan Regional.

Secara umum, potensi gangguan keamanan tradisional yang bersumber dari konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara cukup terkendali. Hal tersebut tercermin dari kasus klaim teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang berakhir di meja perundingan. Sementara, konflik tumpang tindih di Laut China Selatan (LCS) dalam beberapa tahun belakangan ini juga cenderung lebih kondusif. Dewasa ini masing-masing pihak yang terlibat klaim tumpang tindih telah sepakat untuk melakukan *joint-development* di wilayah tersebut, bahkan RRC yang merupakan satu-satunya negara yang berambisi untuk menguasai seluruh kawasan LCS sudah menegaskan keinginannya untuk menyelesaikan masalah LCS sesuai dengan hukum internasional (UNCLOS tahun 1982). Di samping itu, RRC dan ASEAN juga telah menandatangani *Declaration on the conduct of parties*

in South China Sea.

Dari kecenderungan-kecenderungan tersebut, dapat dijadikan indikator bahwa gangguan keamanan yang bersumber dari klaim teritorial diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat mendatang. Sedangkan potensi gangguan keamanan yang bersumber dari keberadaan gerakan separatisme di beberapa negara anggota ASEAN, seperti Indonesia, Philipina dan Thailand Selatan sejauh ini aktivitasnya cukup terkendali dengan baik. Sekali pun belakangan ini diakui sering terjadi benturan yang banyak menelan korban jiwa, namun sifat dan ruang lingkungnya relatif terbatas dan dapat ditangani oleh masing-masing negara.

Asia Tenggara tidak hanya menyimpan gangguan keamanan yang bersumber dari konflik tradisional, tetapi juga menyimpan potensi gangguan keamanan non-tradisional. Sejak tragedi *World Trade Centre* (WTC) 11 September 2001 yang kemudian disusul serangkaian teror bom di Indonesia, kawasan Asia Tenggara ditengarai telah menjadi daerah operasi jaringan teroris Ji yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Sejak itu pula kampanye dan kerjasama untuk memerangi terorisme terus dilancarkan oleh AS di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai negara yang memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan, AS belakangan ini tidak hanya mengkhawatirkan aksi teror di daratan, tetapi juga ancaman teror di jalur laut. Munculnya aksi perampokan dan perompakan di Selat Malaka telah menambah kekhawatiran dunia internasional, AS pada khususnya. Biro Maritim Internasional (IMB) menyebutkan bahwa kasus tindak kejahatan maritim meningkat dari 335 serangan di tahun 2001 menjadi 370 serangan di tahun 2002. IMB juga mencatat, pada 2003 sebanyak 64 kasus terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, 15 kasus di Selat Malaka, 23 kasus di Bangladesh, 18 kasus di India, 14 kasus di Teluk Aden, 18 kasus di Nigeria dan beberapa kasus di Afrika, Laut Merah, Laut Karibia dan Amerika Selatan dan Tengah. Se jauh ini korelasi antara aksi bajak laut dan gerakan Al-Qaeda memang belum tegas, namun serangan kelompok Abu Sayyaf terhadap Kapal Superferry 14 di perairan Philipina pada 26 Februari 2004, memberikan gambaran bahwa ancaman teroris internasional bisa saja terjadi di Selat Malaka.

Munculnya kekhawatiran terhadap Selat Malaka dijadikan daerah operasi teror cukup beralasan, jika dikaitkan

dengan maraknya aksi teror bom di kawasan ini, maupun posisi geografis Selat Malaka yang tidak berjauhan dari pusat pelatihan JI di Philipina Selatan. Di samping itu, Selat Malaka yang panjangnya mencapai 600 mil dan disinggahi sekitar 50.000 kapal setiap tahun dapat dianggap oleh jaringan teroris internasional sebagai kawasan yang cukup ideal untuk melakukan aksi mereka. Dengan memanfaatkan jaringan mereka yang ada dan bekerjasama dengan kelompok pemberontak di tiga negara di kawasan ini (GAM, Pattani Merdeka, MILF dan Abu Sayyaf) mereka dapat saja melakukan aksi teror setiap saat. Ada pun faktor lain yang menjadi pendorong kekhawatiran tersebut adalah masih adanya aktivis kelompok teroris internasional Al-Qaeda dan JI yang belum tertangkap, kini ditinggalkan menyebar di beberapa kawasan dan merekrut anggota serta membentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok Islam radikal regional seperti JI, disinyalir juga menggunakan hubungannya dengan *Mindanao Islamic Liberation Front* (MILF) Philipina Selatan untuk melatih anggota baru, guna menggantikan anggota mereka yang telah ditangkap pasca Bom Bali. Bahkan, beberapa dari anggota mereka telah memiliki kemampuan membuat bom. Menurut *International Crisis Group*

(ICG), Philipina merupakan basis utama JI dalam melatih kemampuan anggotanya sejak tahun 1990.

Terkait dengan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara, peristiwa teror bom seperti, *Ledakan Bom Bali, Hotel JW. Marriot, Kedubes Australia, dan terakhir ledakan Bom Bali-II* yang menelan banyak korban manusia tak berdos, telah membuka mata dunia internasional bahwa aksi teroris betul-betul telah menjadi ancaman perdamaian dan keamanan yang harus diperangi oleh seluruh bangsa di dunia. Selama ini, upaya memerangi terorisme yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan menangkap dan menahan para pelaku yang berada di balik peledakan bom atau yang diduga sebagai anggota JI, baru sebatas melumpuhkan struktur organisasi JI di Asia Tenggara.

BERBAGAI ANCAMAN YANG MENGARAH KEPADA DISINTEGRASI BANGSA.

Ideologi – Politik.

- Fenomena Kebangkitan Komunisme
Bangkitnya komunisme di Indonesia merupakan fenomena yang patut

diwaspadai, mengingat peran Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lampau yang melakukan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewaspadaan ini juga termasuk terhadap aktivitas para eks Tapol/Napol G.30.S/PKI, yang akhir-akhir ini gengsar menuntut rehabilitasi. Dengan memanfaatkan iklim keterbukaan di era reformasi, para eks Tapol/Napol G.30.S/PKI terus menyampaikan tuntutan rehabilitasi berkaitan dengan nasib mereka yang merasa diperlakukan tidak adil. Melalui "Petisi 2005", para eks Tapol/Napol G.30.S/PKI yang tergabung dalam Korban Rezim Orde Baru (KROB) dan Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) menuntut rehabilitasi untuk pemulihahan hak, harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya sebagai warga negara Indonesia.

Tuntutan rehabilitasi dari para eks G.30.S/PKI itu, seharusnya tidak hanya sekedar dilihat dari aspek kemanusiaan, hukum dan HAM semata, tetapi juga harus dilihat dari sejarah dan keberadaan PKI sebagai bahaya laten yang bisa menjadi ancaman terhadap bangsa dan negara. Tidak tertutup kemungkinan, tuntutan rehabilitasi ini sebagai ba-

gian dari upaya untuk menghidupkan ideologi komunisme dengan memanfaatkan euforia kebebasan di era reformasi saat ini. Bangkitnya paham ini merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin tajam. Munculnya tuntutan rehabilitasi dari kalangan eks Tapol/Napol G.30.S/PKI dan juga tuntutan pencabutan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966, ditengarai sebagai tanda-tanda yang menyertai bangkitnya komunisme di Indonesia. Masalah ini perlu mendapat perhatian pihak terkait. Ke depan, bahaya laten komunisme harus tetap menjadi perhatian bangsa dan negara Indonesia, melalui upaya peningkatan kewaspadaan

➤ Gejala Pancasila Phobia

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kini kurang mendapat perhatian lagi dari kalangan masyarakat. Bahkan, di kalangan masyarakat ada semacam phobia untuk menyebut kata "Pancasila". Terjadinya penurunan moral bangsa dan nasionalisme, sikap-sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dari pada kepentingan bersama, konflik-konflik yang merebak di sejumlah daerah dan

permasalahan sosial lainnya, dapat dijadikan indikasi bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tidak diamalkan lagi oleh warga masyarakat. Sejauh ini, meskipun secara formal Pancasila tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi dirasakan hanya sebatas pada pernyataan politik.

Tidak ada ijtihad politik dan upaya konkrit untuk memberikan pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan kebijakan negara. Kalau ada upaya-upaya ke arah itu, terkesan kurang serius karena takut dianggap ademokrasi dan anti-reformasi. Kecenderungan ini diperkirakan masih akan berlangsung terus, jika tidak ada upaya untuk menemukan paradigma baru dalam memahami dan mengamalkan Pancasila. Hal ini bisa dipahami karena arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya. Aktivis-aktivis pro-demokrasi tidak tertarik merespon ajakan dari siapa pun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sejak dicabutnya Tap MPR No.II/MPR/1978, pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila diserahkan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun pe-

laksanaannya kurang diaktualisasikan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis. Bahkan oleh sementara lembaga pendidikan, pelajaran Pancasila dihapus dari kurikulum. Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi, dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan.

➤ Gerakan Sosdem

Kelompok sosialis pasca tumbangnya rejim Orde Baru, terlihat terus berupaya untuk menanamkan pengaruhnya dalam perubahan politik Indonesia. Mereka melakukan berbagai manuver politiknya secara terselubung, dengan mengandalkan pembentukan opini masyarakat dan penciptaan isu-isu yang sensitif untuk menggiring persepsi umum ke arah doktrin "Manifesto Indonesia" yang mereka cita-citakan. "Manifesto Indonesia" menempatkan kemakmuran rakyat sebagai ujung perjuangan politik di atas tujuan, asas, dan dasar negara. Karena itu, konsep negara dan konsep kedaulatan wilayah diletakkan untuk kepentingan kemakmuran, dan konsep-konsep

tersebut harus dirubah paradigmanya bila ternyata gagal menciptakan kemakmuran rakyat.

Kelompok sosialis secara cerdas ikut mendorong proses kejatuhan Gus Dur lewat satu skenario yang rapi, ketika Presiden ke-4 Republik Indonesia tersebut dianggap telah gagal untuk mengakomodasi kepentingan dan cita-cita dari kelompok sosialis. Kelompok sosialis terindikasi kembali melakukan persiapan hendak merancang satu manuver politik dan skenario terselubung, untuk menggoyang pemerintah yang ada pada saat ini. Persiapan awal tersebut dimulai ketika kelompok sosialis mengadakan pertemuan di Bandung pada 16 September 2004. Pertemuan tersebut menyepakati untuk melakukan tekanan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, agar bisa selaras dengan cita-cita mereka mewujudkan "Manifesto Indonesia". Pertemuan juga menyetujui bahwa bila pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan oleh kelompok sosialis, maka mereka akan melakukan suatu skenario destabilisasi politik untuk menggoyang pemerintahan.

Walaupun masih dalam tahapan yang sangat dini, tampaknya kelompok sosialis kembali berupaya mengulang sukses manuver politik terselubung yang telah dilakukan, ketika merasa tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid beberapa tahun yang lalu. Selain pembentukan opini, provokasi gerakan massa, dan penggalangan gerakan anti-pemerintah, kelompok sosialis juga akan berupaya memanfaatkan peluang-peluang lain, seperti upaya merancang politik pecah belah antara kubu Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan kubu Wapres Jusuf Kalla. Adanya perbedaan bahwa kubu Presiden Susilo Bambang Yudoyono didominasi oleh "kaum priyayi", dan kubu Wapres Jusuf Kalla didominasi oleh "kaum pedagang", merupakan peluang yang mudah digarap oleh kelompok sosialis, sehingga terjadi saling curiga dan saling tidak percaya.

Kelompok sosialis akhir-akhir ini terdeteksi mulai menghidupkan kembali jaringan politik terselubung yang mereka miliki. Dalam satu tahun ke depan, kelompok ini bisa menyiapkan segala kondisi dan prasyarat, untuk bisa dijadikan akses untuk menggoyang pemerintahan Presiden

Susilo Bambang Yudoyono, bila dianggap menyimpang dari cita-cita memprioritaskan peningkatan kemakmuran rakyat. Walaupun gerakan ini masih prematur, tetapi segalanya patut diantisipasi dan dicegah ekses-ekses negatifnya sedari dini, karena kalau dibiarkan menggelingding ada kemungkinan mereka bisa mengulang sukses di masa lalu.

➤ Kelompok Garis Keras

Perkembangan politik di Indonesia yang sedang menuju arah keterbukaan, telah membawa angin segar bagi bangkitnya kembali kelompok tertentu garis keras Islam, yang selama Orde Baru termarginalkan dalam percaturan politik nasional. Dalam kaitan ini, yang perlu mendapat perhatian dan pencermatan adalah sepak terjang sejumlah aktivisnya yang cenderung radikal, dan sikapnya yang sering berseberangan dengan pemerintah. Kelompok ini diperkirakan akan terus berupaya memperjuangkan strategi mereka yang adakalanya cenderung anarkhis.

➤ Konflik Parpol

Perkembangan politik nasional secara signifikan ditandai oleh fenomena oposisi parlemen dan konflik inter-

nal partai politik. Fenomena oposisi parlemen cenderung mengalami penebalan, terindikasi dari adanya resistensi sebagian fraksi di DPR terhadap hampir setiap kebijakan pemerintah. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS), cenderung selalu bertentangan dengan langkah dan kebijakan pemerintah. Perkembangan terkini menunjukkan adanya upaya penggunaan hak interpelasi DPR atas kenaikan harga BBM, yang dimotori oleh Fraksi PDI-Perjuangan dengan fraksi sekondannya F-PKB dan F-PDS.

Sementara, dinamika internal partai politik menunjukkan kecenderungan mengerasnya friksi dan bahkan konflik di sebagian partai. Kecenderungan konflik internal yang melahirkan dualisme kepemimpinan partai politik dialami beberapa partai besar di Indonesia, seperti PDI-Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Konflik tersebut nyaris berujung pada perpecahan partai, meskipun ada partai yang mengupayakan islah.

Konflik-konflik tersebut awalnya bermula dari keinginan mengganti ketua umum partai, yang memang memegang peranan penting dalam kebijakan partai. Fenomena kepengurusan kembar partai politik di Indonesia sebagai imbas konflik internal partai, sebenarnya merupakan fenomena klasik dalam politik kepartaian di Indonesia. Di era reformasi, perpecahan partai politik yang menghasilkan dualisme kepemimpinan struktural, lebih disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, bipolaritas kepentingan politik yang berpengaruh terhadap harmoni partai. Bipolaritas antara pragmatisme yang menjangkiti kader/elite partai berhadapan dengan idealisme yang dipegang oleh kader/elite partai yang teguh mempertahankan jiwa ideologi dan garis konstitusional partai. *Kedua*, terhambatnya proses regenerasi akibat pola kepemimpinan patronatif, kharismatik, dan feodalistik yang menjegal kompetisi demokratis dalam pergantian kepemimpinan partai. Karena tokoh yang kharismatik di dalam partai masih ingin mempertahankan otoritasnya, sementara kekuatan reformis atau dekonstruksi di jajaran kader semakin kuat dan menuntut proses percepatan suksesi. Ini terjadi di partai-partai tradisio-

nal yang mengandalkan ikon kepemimpinan partai yang kharismatik dan berbasiskan loyalitas massa kepada figur pemimpin partai.

Gejolak politik yang bermuara pada perpecahan internal partai politik akan berpengaruh pada konstelasi politik nasional. Implikasi politik yang akan muncul dalam jangka pendek adalah tidak optimalnya kinerja fraksi-fraksi di DPR, sehingga secara umum akan mempengaruhi kinerja DPR. Dalam jangka menengah, gejala perpecahan di tubuh partai politik akan menghambat, mengganggu, bahkan mengancam proses konsolidasi partai. Energi partai yang terfokus pada penyelesaian konflik, dapat menyebabkan kinerja dan organisasi di internal partai menjadi terbengkalai.

➤ Pilkada

Permasalahan lain yang diperkirakan mewarnai situasi politik dan keamanan nasional adalah eksekusi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Eksekusi dari pelaksanaan Pilkada sudah ditunjukkan pada Pilkada tahun 2005 ini. Sepanjang Juni – Desember 2005 penyelenggaraan pilkada dilaksanakan di 226 daerah,

yang terdiri dari 11 pemilihan Gubernur, 179 pemilihan bupati dan 36 pemilihan walikota. Pelaksanaan Pilkada pada bulan Juni merupakan putaran Pilkada yang paling banyak (80%), yang diikuti 181 daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan secara lancar, meskipun di sejumlah daerah terjadi ketegangan politik di tingkat lokal. Munculnya potensi konflik pada pelaksanaan Pilkada terjadi dari sejak dimulainya tahap penjurangan calon kepala/wakil kepala daerah, massa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan kepala daerah terpilih. Dalam tahap persiapan, terjadinya konflik disebabkan karena adanya intrik-intrik politik, baik untuk mendukung maupun saling menjatuhkan di antara bakal calon kepala daerah. Selain itu, beberapa kelemahan KPUD dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah juga dieksploitasi oleh pihak-pihak yang kecewa (yang tidak lolos verifikasi) menjadi isu-isu yang meresahkan, seperti ketidaknetralan KPUD atau keberpihakan KPUD pada bakal calon tertentu. Namun, hanya sedikit kasus sengketa Pilkada yang muncul sebelum pelaksanaan pemu-

ngutan suara. Sengketa Pilkada baru diangkat tim sukses, setelah pemasangan kandidat yang dijagokannya kalah dalam perolehan suara. Bentuk paling umum dari ketidakpuasan adalah menolak menandatangani berita acara penghitungan suara, yang kemudian mengajukan gugatan terhadap proses pelaksanaan Pilkada ke pengadilan agar kepala daerah terpilih dibatalkan dan menuntut pemilu diulang. Namun, tidak sedikit yang mengerahkan massa berdemonstrasi untuk menekan KPUD atau DPRD membatalkan hasil Pilkada, dan meminta pemungutan suara ulang.

Mengingat pelaksanaan Pilkada akan terus bergulir dari tahun ke tahun, maka jika tidak dilakukan pembenahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk merevisi aturan hukumnya, kecenderungan terjadinya potensi konflik dengan pola yang sama masih akan berlangsung pada Pilkada yang akan datang.

Sementara itu, bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan Pilkada, tahun 2006 merupakan tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan, di mana kepala daerahnya merupa-

kan hasil pemilihan langsung. Beberapa kecenderungan yang dapat terjadi adalah kemungkinan masih membaranya dendam politik dari kandidat terkalahkan. Terlebih, banyak pemenang Pilkada langsung tersebut ternyata memperoleh suara kurang signifikan (kurang dari 50%). Ini berarti, jika kepala daerah terpilih tersebut tidak hati-hati menjalankan roda pemerintahan, maka sangat mungkin akan menghadapi banyak kendala yang akan memunculkan berbagai persoalan rumit di kemudian hari.

➤ **Gerakan Kelompok Kritis**

Kecenderungan beberapa tokoh masyarakat/elite politik yang saat ini berada di luar pemerintahan dan parlemen, berupaya untuk memanfaatkan momentum yang ada untuk mengkritisi pemerintah. Tujuan di balik kegiatan kritikal tersebut, selain agar kepentingannya dapat terakomodasi, tampaknya juga untuk menarik simpati masyarakat demi kepentingan politik mereka. Beberapa momentum untuk mengkritisi pemerintah cenderung akan terus berlanjut, di antaranya adalah kegiatan "Apel Kesetiaan NKRI-Pancasila-UUD 1945" dalam rangka menyambut HUT RI ke 60. Apel

yang diikuti sekitar 500 orang tersebut mencoba menyikapi kondisi negara NKRI saat ini, yang dianggap telah melenceng dari cita-cita pendiri negara sebagai akibat dari amandemen UUD 1945 yang dinilai "kebablasan".

Tokoh-tokoh nasional yang hadir di antaranya, Syaiful Sulun, Sutardjo Suryoguritno, Guruh Soekarnoputra, Abdurrahman Wahid, Ali Sadikin, Edi Sudrajat, dan lain lain. Sementara itu, beberapa tokoh seperti Akbar Tandjung, Try Sutrisno, Abdurrahman Wahid, Megawati, Wiranto, Nugroho Jayusman, dan Hariman Siregar secara maraton aktif menggelar pertemuan antar tokoh. Pertemuan di rumah Akbar Tandjung beberapa waktu lalu, misalnya, sepakat mengusulkan kepada pemerintah agar menunda kenaikan harga BBM. Selain itu pertemuan tersebut juga menegaskan pernyataan sikap yang isinya mengkritisi kebijakan pemerintah. Pertemuan sebelumnya juga pernah dilakukan di kediaman Try Sutrisno, Wiranto, dan kediaman Gus Dur. Sedangkan pertemuan selanjutnya akan diadakan di kediaman Megawati Soekarnoputri.

Meskipun kegiatan kelompok ini ti-

dak bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah, namun nuansa mengkritisi pemerintah cukup kental, sehingga dapat menambah spirit bagi kelompok-kelompok pergerakan. Pertemuan para tokoh tersebut diperkirakan akan berlanjut terus secara berkala, selama mereka berada di luar pemerintahan.

Pertahanan – Keamanan.

➤ Terorisme

Sejak pemboman Kedubes Australia di Jakarta, September 2004, aksi terorisme yang dilancarkan jaringan Jl cenderung *cooling down*. Jaringan teroris ini tercerai-berai, setelah aparat keamanan melancarkan berbagai operasi pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku bom. Meskipun sempat tercerai-berai, namun tidak serta-merta sudah melumpuhkan jaringan Jl. Meskipun Dr. Azahari telah berhasil dilumpuhkan, namun keberadaan Noordin M. Top bersama jaringannya seperti Dul Matin, Dzulkarnaen, Abu Dujana, Jabir, Chandra, Umar Patek, Aris Munandar, atau Zuhroni, masih membuka kemungkinan bagi terjadinya aksi-aksi pemboman di Indonesia. Dalam pengejaran dan persem-

bunyiannya, para teroris justru melakukan konsolidasi dan rekrutmen anggota.

Ternyata, jaringan Jl sudah berhasil menyiapkan kader-kader militan yang siap melakukan serangan bom bunuh diri. Hal ini sudah teruji, dengan kasus bom bunuh diri di Jimbaran dan Kuta pada 1 Oktober 2005 lalu. Menilik modus pemboman dengan menggunakan martir pelaku (bom bunuh diri) dan material bom mirip dengan yang digunakan dengan bom di Kedubes Australia, maka diperkirakan para pelaku bom Jimbaran dan Kuta adalah merupakan kelompok yang *link-up* dengan jaringan Dr Azahari dan Noordin M. Top.

Ke depan, aksi-aksi bom bunuh diri diperkirakan masih akan terjadi. Jaringan Jl terindikasi telah terkonsolidasi, bahkan berhasil membentuk "Brigade Istimata" (pembom bunuh diri), dan masih adanya koneksi dengan jaringan klandestin Jl di luar negeri (Afghanistan, Thailand Selatan, Malaysia, dan Philipina). Faktor pendorong lain yang menjadi *trigger* bagi masih akan terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia adalah kebijakan AS untuk memerangi terorisme

dengan sasaran kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Indonesia sendiri.

Jaringan teroris di Indonesia yang memiliki *link-up* dengan kelompok-kelompok tertentu Islam "garis keras" di luar negeri, cenderung akan selalu bereaksi terhadap setiap kebijakan AS yang dianggap memusuhi Islam di belahan bumi mana pun. Belum tertangkapnya seluruh jaringan pelaku pemboman di Indonesia, dan belum terputusnya jaringan di dalam negeri dengan jaringan dari luar negeri, serta adanya kebijakan AS yang "memusuhi" kelompok-kelompok "garis keras" ini, menjadi potensi ancaman bagi terulangnya kembali aksi-aksi pemboman di Indonesia, dengan sasaran AS dan atau kepentingan Barat.

➤ Separatisme

Potensi separatisme di Indonesia cenderung masih akan terus eksis, terutama di 3 daerah, yaitu Aceh, Papua, dan Ambon. Di Aceh, meskipun sudah dicapai nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk menyelesaikan masalah Aceh secara damai, menyeluruh, dan ber-

martabat berdasarkan konstitusi dan dalam kerangka negara kesatuan. Namun bukan berarti langkah tersebut akan serta-merta menghilangkan fenomena separatisme di Aceh. Masih eksisnya GAM pasca implementasi MoU Helsinki, mengindikasikan belum selesainya ideologi separatis sebagian masyarakat Aceh. Substansi MoU Helsinki yang mengandung beberapa masalah krusial yang bisa ditafsirkan menguntungkan GAM juga mengindikasikan "kemenangan" GAM. Pasca pemberian amnesti terhadap anggota GAM, relatif memberikan keleluasaan kepada anasir-anasir separatis di Aceh untuk mengonsolidasikan kekuatannya. Namun demikian, penyerahan dan penghancuran 840 senjata GAM akan memperkecil kekuatan sayap militer GAM. Diperkirakan, GAM akan mengubah strategi perjuangannya, dengan lebih mengedepankan perjuangan politik. Karenanya, Gerakan Seperatis Aceh (GSA) cenderung masih akan eksis pasca implementasi MoU Helsinki.

Sementara itu, separatisme di Papua pun menunjukkan *trend* menguat, terutama pada gerakan politiknya. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam tahun-tahun terakhir ini me-

ngubah garis perjuangannya. OPM cenderung mulai meninggalkan perjuangan bersenjata dan lebih berkonsentrasi pada tataran politik, dengan berbagai manuver politik di fora internasional maupun gerakan-gerakan politiknya di dalam negeri melalui anasir-anasir seperatisnya. Meskipun kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua bertumpu pada strategi "pengembangan satu daerah untuk daerah lainnya" dengan kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah, namun kebijakan ini masih akan mendapatkan resistensi dari sebagian kelompok masyarakat Papua. OPM cenderung akan semakin meningkatkan perjuangan politiknya di AS, Eropa, dan Asia Pasifik, dengan mengeksploitasi isu Pepera 1969, pelanggaran HAM, dan sentimen Melanesian, untuk menggalang dukungan bagi tujuan melepaskan diri dari wilayah NKRI. Di dalam negeri, anasir-anasir seperatis Papua, masih akan memanfaatkan lembaga-lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua dan Dewan Adat Papua.

Sedang di Maluku, anasir separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang direpresentasikan oleh organ *onderbouw* seperti Front Kedaulatan Ma-

luku (FKM) memang cenderung melemah, setelah sejumlah aktivisnya diadili. Namun, hal ini juga tidak serta-merta mengikis habis ideologi separatis di Maluku. Masih eksisnya elemen-elemen RMS di Belanda dan AS, serta belum berhasil diekstradisinya tokoh sentral FKM Alex Manuputi dari AS, setidaknya masih akan memberikan inspirasi bagi anasir-anasir seperatis Maluku, untuk terus mengonsolidasikan kekuatan internal mereka. Suasana kebatinan kelompok separatis Maluku diperkirakan masih relatif terkonsolidasikan, sehingga potensi separatis masih akan menjadi ancaman laten di wilayah Maluku.

➤ Konflik Sosial

Konflik sosial yang terjadi di Poso dan Ambon dipicu oleh akibat ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, serta merebaknya fenomena premanisme. Stabilitas keamanan di Poso, cenderung masih semu. Terjadinya aksi-aksi kekerasan dan teror bom secara sporadis yang lalu, menunjukkan bahwa potensi konflik antar kelompok masih cukup besar. Masih semunya kondisi keamanan di Poso dan Ambon, menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut masih menyimpan potensi konflik yang

cukup besar. Konflik sosial di Poso dan Ambon sewaktu-waktu dapat pecah kembali, tergantung pada intensitas faktor pemicunya.

➤ Ancaman Militer

Masalah perbatasan negara, baik di darat maupun di wilayah perairan, masih akan potensial menjadi sengketa wilayah, yang dapat mengarah pada terjadinya konflik terbuka dan melibatkan kekuatan militer. Di wilayah perairan Indonesia pada saat ini terdapat 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 12 pulau di antaranya rawan dikuasai negara lain.

KESIMPULAN

Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis dalam era globalisasi, potensi terhadap perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak saja bersumber dari persoalan-persoalan domestik, tetapi juga berdimensi internasional. Selain terdapat aspek politik, perkembangan lingkungan strategis juga perlu diwaspadai dampaknya berupa ancaman terhadap kepentingan nasional, khususnya yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Dalam kurun waktu satu tahun ke depan, aksi terorisme merupakan ancaman yang paling menonjol. Di samping merupakan fenomena global, terorisme mendapat "lahan subur" di Indonesia. Belum tertangkapnya seluruh jaringan teroris dapat menjadi indikasi aksi terorisme masih merupakan ancaman nyata bagi stabilitas keamanan, apalagi dalam persembunyiannya mereka telah berhasil merekrut kader-kader baru pelaku teror. Lemahnya perangkat hukum dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia juga menjadi pemicu berkembangnya aksi terorisme.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM telah mereduksi ancaman gerakan separatisme, setidaknya di Aceh. Meskipun masalah ini masih menyisakan polemik di masyarakat, namun dengan kondisi Aceh yang damai proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca bencana tsunami akan bisa berjalan lancar, termasuk masuknya aliran dana dari para donatur asing. Bagi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, kesepakatan RI-GAM tersebut dijadikan sebagai *entry point* untuk mendiskreditkan pemerintah, bersinggungan dengan elemen-elemen masyarakat yang senantiasa menentang kebi-

jakan pemerintah. Seiring dengan proses demokratisasi, aksi-aksi menentang kebijakan pemerintah akan semakin marak, baik berupa aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa maupun pembentukan opini lewat media massa, seminar, dan diskusi. Namun, karena masing-masing kelompok yang berseberangan dengan pemerintah

tersebut memiliki agenda sendiri-sendiri dalam menyikapi kebijakan pemerintah, mereka diperkirakan tidak akan mampu menciptakan *common enemy* yang mengarah pada terbentuknya suatu *people power*, sehingga eksistensi pemerintah dalam satu tahun ke depan diperkirakan masih dalam posisi yang tidak membahayakan. □

